

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG																
<input type="checkbox"/> Lampung Post	<input checked="" type="checkbox"/> Tribun Lampung															Halaman
<input type="checkbox"/> Radar Lampung																1
Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021			

Dua ASN Setor Fee Rp 1 Miliar

■ Para Kontraktor Setor Fee Rp 700 Juta

■ Untuk Dapat Proyek di Lampung Tengah

■ Perkara Suap dan Gratifikasi Eks Bupati Lamteng Mustafa

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah sudah menjadi "makanan" bersama banyak pihak. Orang-orang yang menyeter fee untuk mendapat proyek di kabupaten ini bukan saja para kontraktor, tapi juga PNS di kabupaten setempat.

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa di

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis (15/4).

Dalam sidang tersebut diketahui, seorang PNS di Lamteng menyerahkan fee sebesar Rp 500 juta dan PNS di Lamtim menyerahkan fee Rp 500 juta. Sehingga dari kedua PNS ini saja, setor-

● ke halaman 5

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG																
<input type="checkbox"/> Lampung Post	<input checked="" type="checkbox"/> Tribun Lampung															Halaman
<input type="checkbox"/> Radar Lampung																Sambungan 1
Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021			

Dua ASN Setor Fee Rp 1 Miliar

Sambungan Hal.1

an fee sudah mencapai Rp 1 miliar. Penyerahan fee ini untuk mendapatkan proyek di Lamteng.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan 7 orang saksi dalam sidang ini. Para saksi itu berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Lampung Tengah dan juga para kontraktor yang pernah menyeterkan fee proyek untuk Mustafa.

Adapun para saksi yakni, Dr Nur Rohman (PNS/mantan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lamteng), Usman Gumantif Arif (PNS Dinas Perhubungan Lampung Timur).

Kemudian, M Asik Syarif (kontraktor/ mantan Wakil Direktur CV Ayu), Bobi Sutowo (kontraktor), Kurnain (Direktur CV Kurnia Jaya), Abdul Aziz (Direktur CV Enam Sembilan) dan Syarifuddin Safari (petani).

Dalam sidang itu, terungkap jika saksi Dr Nur Rohman pernah menyerahkan uang total Rp 1,1 miliar kepada Kadis PUPR Lampung Tengah saat itu, Taufik Rahman. Namun Nur membantah bahwa penyerahan uang itu untuk mendapatkan proyek. Ia menyebut uang tersebut adalah pinjaman.

"Itu pinjaman pribadi untuk menutupi BPK agar Lampung Tengah mendapat predikat WTP. Saat itu Pak Taufik ketemu saya mau pinjam uang itu. Lalu saya bilang saya lihat dulu di kas rumah tangga. Dan ternyata ada, jadi saya berikan," katanya. Nur menyebut dirinya memiliki usaha fotokopi ATK, apotek, dan klan.

Mendengar jawaban saksi ini, JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengungkapkan jika keterangan saksi berbeda dengan keterangan di BAP yang mana melakukan penyerahan Rp 600 juta.

Saksi pun menjawab jika dia lupa. "Tapi yang jelas dua kali, Rp 700 juta dan

Rp 600 juta. Penyerahan Rp 600 juta tahun 2017, ada Pak Taufik dan Mas Indra Airlangga, tapi saya lupa," kata Nur.

Mendengar jawaban saksi yang berbelit-belit, Jaksa Taufiq membacakan BAP. Jadi sekitar seminggu setelah pertemuan dengan Taufik, Indra menelepon menanyakan uang Rp 600 juta. Lalu bertemu di depan kantor Bapeda, dan saya serahkan uang Rp 600 juta, dan saya sampaikan kalau ada lagi saya serahkan," heber Taufik.

Lanjut JPU, dua minggu kemudian Indra Airlangga kembali menghubungi dan meminta untuk menyiapkan uang Rp 500 juta. "Lalu saya ketemu di belakang KPU Lampung Tengah, dan saya tanyakan soal pengembalian Rp 600 juta katanya dibalikkan pada November," ujar JPU KPK Taufiq Ibnugroho membacakan BAP.

Nur pun pada akhirnya mengakui jika pinjaman pertama Rp 600 juta untuk urusan BPK dan kedua Rp 500 juta yang mana tak diketahui peruntukannya.

"Rp 600 juta sempat dikembalikan, yang Rp 500 juta, katanya kalau gak ada duit nanti dikasih pekerjaan. Dan saya ngomong itu santai, yang penting uangnya balik," akunya.

Bukan cuma Nur yang menyeterkan fee, ASN Dinas Perhubungan Lampung Timur Usman Gumantif juga menyeterkan fee sebesar Rp 500 juta untuk mendapatkan proyek di Lamteng. Uang tersebut ia serahkan ke orang kepercayaan Taufik Rahman, Indra Airlangga.

Uang Rp 500 juta itu ia serahkan dua kali. Penyerahan pertama di sebuah hotel di Bandar Lampung Rp 300 juta dan penyerahan kedua di pinggir jalan Rp 200 juta. "Proyeknya belum tahu, yang jelas di Dinas PU dan

setor fee		san-kegiatan
4. Kontraktor Bobi Sutowo setor Rp 600 juta	6. Kontraktor Syarifuddin Safari (Mantan Wakil Direktur CV Putra Utama)	
5. Kontraktor Abdul Aziz (Direktur CV Enam Sembilan)	● Setor Rp 700 juta untuk paket pekerjaan senilai Rp 2,5 miliar tahun 2018.	
● Setor Rp 700 juta untuk proyek pembangunan Puskesmas di tahun 2017.	# Keterangan saksi dan penjelasan JPU KPK dalam sidang di PN Tanjungkarang, Kamis (15/4).	

GRAFIS TRIBUN LAMPUNG/SAPTO

mengusahakan pekerjaan," sebutnya.

Setoran Kontraktor

Selain ASN, tentu saja para kontraktor yang menyerahkan fee proyek. Ini seperti diakui Bobi Sutowo. Ia mengaku pernah mendapat proyek tahun 2016 di Lamteng.

"2017 saya mencoba ikut pekerjaan lagi dan saya menemui Indra, saya minta pekerjaan, waktu itu suruh menunggu, ujarnya.

JPU KPK Taufiq Ibnugroho lantas membacakan BAP saksi Bobi. "Saksi mendatangi rumah Indra Airlangga bersama anak istrinya. Dalam pertemuan itu Bobi minta tolong untuk mendapat pekerjaan. Indra menyampaikannya untuk mengerjakan proyek harus menyerahkan fee 17-20 persen, dan saya menyanggupinya. Setelah itu?" tanya Taufiq membacakan BAP.

"Setelah itu, beberapa minggu kemudian saya ditelpon kembali oleh Indra. Indra menyampaikannya ada pekerjaan di Dinas Bina Marga dan minta serahkan fee Rp 600 juta. Penyerahan dilakukan dua kali," jelasnya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan Direktur CV Kurnia Jaya Kurnain. Ia pun mengaku mendapatkan proyek di Lamteng dan menyeterkan fee.

"Awal pelantikan 2016 saya datang untuk memberikan selamat atas pelantikan Bupati. lalu saya minta

petunjuk mendapat pekerjaan," katanya.

Kurnain mengatakan, Mustafa menyampaikan agar ke Dinas PUPR.

"Dan waktu itu masih Pak Muhibat, lalu ke sana menemuinya dan katanya suruh nunggu info dulu. Belum disampaikan pekerjaan. Baru setelah itu diberikan pekerjaan Jalan Sinar Banten," kata dia.

Sementara itu, Direktur CV Enam Sembilan Abdul Aziz mengatakan, menyeterkan fee sekitar 20 persen untuk proyek pembangunan Puskesmas di tahun 2017 senilai Rp 700 juta. Uang disetorkan ke Taufik di pinggir jalan Lamteng.

Syarifuddin Safari selaku mantan Wakil Direktur CV Putra Utama 2012-2016. Bidang konstruksi mengaku perusahaannya pernah menyerahkan uang Rp 700 juta untuk paket pekerjaan senilai Rp 2,5 miliar di tahun 2018.

"Penyerahannya dua kali. Pertama di sebuah rumah sakit Rp 500 juta ke Indra saat dirawat. Kedua Rp 200 juta di hotel, penyerahan tahun 2017 untuk pekerjaan tahun 2018," kata dia.

Saksi M Asik Syarif selaku mantan Wakil Direktur CV Ayu mengaku juga menyeterkan fee Rp 700 juta ke Kadis PUPR Lampung Tengah Taufik Rahman. Namun uang tersebut justru dibalikkan oleh ajudan Mustafa. (nif)